

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Dana RT/RW Hingga Jumantik Pada Tahun 2023 Diusulkan Naik

JAKARTA (Poskota) - Dana untuk RT/RW, Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK), Dasawisma dan Juman tik di DKI Jakarta diu sulkan naik pada ta hun 2023 mendatang. Rencana itu karena keberadaan mereka dianggap garda ter depan dan kepanjan gan tangan pelayanan pemerintah kepada warganya.

Merespon hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengaku, telah merekomenda sikan agar duit peny elenggaraan tugas dan fungsi RT/RW dinaikan. Sebab, di katakannya, uang pe nyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW be lum pernah mengalami penyesuaian sejak ta hun 2018.

Maka dari itu, Mu jiyono mendorong agar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera melakukan pe rubahan Keputusan Gubernur (Kegub) Nomor 1674 tahun

2018. Pasalnya, Kepgub tersebut merup akan warisan dari kepala daerah sebe lumnya yaitu, Anies Baswedan.

"Ya perlu segera dilakukan perubahan terhadap Kegub No mor 1674 tahun 2018 tentang pemberian uang penyelengga raan tugas dan fungsi RT/RW. Komisi A juga meminta adanya re alisasi peningkatan operasional untuk FKDM, LMK, Dasa Wisma dan kader Juman tik," ujar Mujiyono, Minggu (27/11).

Kemudian, di dalam Kegub terse but, uang operasional RT ditetapkan sebe sar Rp 2 juta per bu lan, dan operasional RW mencapai Rp 2,5 juta per bulan.

Menurut Mujiyono, duit penyelenggaraan tugas kegiatan RT dan RW itu bukan gaji untuk pribadi Ketua RT dan RW, tetapi untuk penyelengga raan tugas yang bersi fat kolektif pengurus RT dan RW dalam

menyelenggarakan tugas-tugas fungsi RT dan RW.

Selanjutnya, untuk setiap anggota LMK mendapatkan uang operasional Rp 1 juta per bulan di wilayah kota dan Rp 1,5 juta di Kepulauan Seribu. Selain itu, ada juga biaya kesekretariatan yang jumlahnya Rp 3 juta per kelurahan per bulan.

"Rekomendasi ini sudah kami sampai kan saat rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Jumat (25/11/2022) kemarin, dengan me nyepakati nilai rancan gan APBD tahun 2023 sebesar Rp 83,7 trili un," terang Mujiyono.

Diketahui, postur rancangan anggaran pendapatan dan be lanja (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2023 berubah. Karena, awalnya DPRD DKI Jakarta dan Pem prov DKI Jakarta menyepakati RAPBD 2023 sebesar Rp

82,54 triliun beberapa pekan lalu, namun kini menjadi Rp 83,71 triliun.

Kesepakatan ter baru itu diputuskan setelah DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta menyele saikan proses pem bahasan anggaran melalui rapat pendala man di Komisi A sam pai E.

Keduanya kemu dian membahasnya lagi melalui forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dari Kamis (24/11/2022) sampai Jumat (25/11/2022) dini hari.

"Alhamdulillah Banggar DPRD dan TAPD (Tim Angga ran Pemerintah Dae rah) DKI Jakarta pagi ini pukul 03.44 me nyepakati Rancangan APBD Tahun Angga ran 2023 sebesar Rp 83,7 triliun," kata Ket ua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang dikutip dari akun resmi Instagram mi liknya, Jumat (25/11).
(Aldi/lfn)